

## **PERAN PELEMBAGAAN DALAM PROGRAM ONE VILLAGE ONE PRODUCT MELALUI EMPOWERMENT MASYARAKAT**

**Siwi Dyah Ratnasari<sup>1</sup>, Akhmad Saikhu<sup>2</sup>, Sunarto<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>STIE Malangkucecwara Malang

Email: siwiratna@stie-mce.ac.id

### **Abstrak**

One village one product (OVOP) merupakan konsep pengembangan ekonomi yang mengarahkan suatu wilayah mampu menciptakan produk bercirikan lokal dengan potensi sumberdaya lokal dan berdaya saing global. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui: 1) proses pelaksanaan OVOP sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat 2) untuk mengetahui model pelebagaan yang digunakan dalam pelaksanaan program OVOP. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan di Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Metode yang digunakan berupa metode *interractive* model. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Tahapan penelitian meliputi: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Proses pelaksanaan OVOP meliputi: a) Pemetaan potensi, b) Menemukan sasaran pada basis desa tertinggal, c) OVOP dikembangkan secara kelompok, d) Memilih potensi lokal, e) Mengembangkan potensi lokal, f) Menguatkan kelembagaan dengan konsep pemberdayaan, g) Membuat perencanaan usaha. 2) Model pelebagaan yang digunakan dalam pelaksanaan OVOP adalah kombinasi antara buttom up dan top down, meskipun feedback belum berjalan secara efektif. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa program OVOP yang telah dilaksanakan memerlukan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

**Kata Kunci:** Pelebagaan, Empowerment, *One Village One Product* (OVOP)

### **Abstract**

*One village one product (OVOP) is an economic development concept that directs a region to be able to create products with local characteristics with local resource potential and global competitiveness. The research objectives are to determine: 1) the process of implementing OVOP as an effort to empower the community's economy 2) to determine the institutional model used in the implementation of the OVOP program. This type of research is qualitative research. The research was conducted in Sadengrejo Village, Rejoso, Pasuruan. The method used is an interactive model method. Data collection techniques through interviews and documentation. The research stages include: data reduction, data presentation and conclusion drawing (verification). The results showed that: 1) The OVOP implementation process includes: a) Potential mapping, b) Finding targets on a disadvantaged village basis, c) OVOP is developed in groups, d) Selecting local potential, e) Developing local potential, f) Strengthening institutions by the concept of empowerment, g) Making business plans. 2) The institutional model used in the implementation of OVOP is a combination of bottom up and top down, although the feedback has not been effective. The implication of this research is that the OVOP program that has been implemented requires monitoring and evaluation to improve the implementation of further activities.*

**Keywords:** *Community, Empowerment, One Village One Product (OVOP)*

## PENDAHULUAN

Pembangunan desa diarahkan dalam rangka mewujudkan pemberdayaan yang mengarah kepada kemandirian masyarakat. Pemberian otonomi yang luas kepada desa diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan wewenang kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui Undang-Undang ini menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang ini juga salah satu komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Shucksmith, (2013) menyatakan pendekatan *bottom-up* untuk pembangunan pedesaan (didorong dari dalam, atau kadang-kadang disebut endogen) berdasarkan pada asumsi bahwa sumber daya spesifik daerah (alam, manusia dan budaya) memegang kunci untuk perkembangannya. Ditengah semakin dewasanya masyarakat serta semakin banyaknya kebutuhan dan tuntutan, saat ini pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan.

Program *One Village One Product* (OVOP) merupakan pola penting pembangunan ekonomi pertanian di Indonesia Cina. Mengambil desa sebagai unit fundamental, memanfaatkan sepenuhnya keunggulan sumber daya lokal, keunggulan tradisional dan keunggulan daerah di daerah tertentu, sesuai dengan tuntutan pasar dalam dan luar negeri (Xujin & Li, 2013). Konsep awal OVOP adalah untuk mendorong desa-desa di Oita masing-masing untuk memilih produk khas daerah dan mengembangkannya hingga standar yang diterima secara nasional dan global (Sun et al., 2015). Pendekatan *One Village One Product* (OVOP) merupakan konsep dalam pengembangan ekonomi wilayah yang mengarahkan suatu wilayah/desa mampu menciptakan suatu produk khas yang bercirikan lokal dengan memanfaatkan segala potensi sumberdaya lokal yang dimilikinya serta berdaya saing global (Purnama et al., 2019). Program ini diposisikan sebagai program pengembangan komoditas unggulan daerah untuk memasuki pasar dalam negeri dan pasar luar negeri (Hadi et al., 2017). Upaya memaksimalkan sumber daya yang ada, program *One Village One Product* (OVOP) merupakan upaya pemerintah meningkatkan nilai tambah produk unggulan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep *One Village One Product* (OVOP) berperan sebagai peningkatan kualitas potensi perdesaan (Susanti et al., 2022).

## KAJIAN TEORI

### Pelembagaan

Pelaksanaan otonomi desa dimaksudkan memberikan hak dan kewenangan kepada pemerintah desa agar desa dapat secara maksimal

memberikan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan harkat dan martabat masyarakat desa untuk mencapai tujuan kehidupan masyarakat yang berkeadilan. Pemerintahan desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kegiatan dimaksud, terutama dalam menyusun peraturan desa, APBD dan penentuan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Desa. Optimalisasi usaha yang ada di BUMDes secara terintegrasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang dapat dilakukan secara efektif, efisien dan berkelanjutan dalam merealisasi program One Village One Product (Ngugi & Bwisa, 2013). Idealnya dalam mewujudkan pendirian BUMDes dipelopori dengan mengoptimalkan kapasitas dan kegiatan ekonomi yang ada. Namun, masih banyak BUMDes yang belum mampu menjalankan proses bisnis yang menghasilkan peningkatan ekonomi yang signifikan, khususnya dalam hal strategi pemasaran (Azizah & Kriswibowo, 2020). Di lingkungan pemerintah desa, kepala desa dan seluruh perangkat desa sebagai pelaksana tugas pemerintah di desa yang diharapkan dapat melaksanakan tugas pemerintah desa dengan baik demi terciptanya kesejahteraan dan pembangunan rakyat di desa. Peran Aparatur Pemerintah Desa dalam pelayanan publik terhadap masyarakat dapat dikatakan terealisasi dengan baik dan efisien apabila mampu mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan yang dikehendaki oleh masyarakat

### ***Empowerment***

Program One Village One Product (OVOP) adalah pendekatan pengembangan ekonomi regional yang berpusat pada masyarakat (Gardebreek, C.1 and Hernandez, n.d., 2019). Konsep pemberdayaan mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*" Pemberdayaan dilihat sebagai masyarakat yang mendapat kontrol, kontrol dapat diterapkan untuk konteks tertentu tetapi umumnya menyiratkan pada menentukan pilihan dan kebebasan tindakan bagi orang lain yang terkena dampak. Pemberdayaan sebagai proses untuk meningkatkan kapasitas individu dalam menentukan pilihan dan mewujudkan pilihan tersebut dengan tindakan nyata. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat. Tantangan produk One Village One Product (OVOP) merupakan strategi pembangunan pedesaan yang bertumpu pada faktor penting seperti kemandirian, dan partisipasi (Sun et al., 2015). Fokus dalam pemberdayaan adalah masyarakat, sehingga pemberdayaan masyarakat sangat tergantung pada aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam suatu kawasan permukiman. Sehingga pemberdayaan didefinisikan sebagai upaya untuk mengembangkan kemampuan sumber daya lokal dan memperluas peran serta masyarakat untuk menjadi aktor utama dalam pengembangan.

*Empowerment* atau pemberdayaan sebagai upaya untuk mengembangkan kemampuan sumber daya lokal dan memperluas peran serta masyarakat untuk menjadi aktor utama dalam pengembangan. Clegg dan Marginn dalam Lawson dan Kearns (2010), pemberdayaan masyarakat

muncul karena bentuk kekalahan dan tidak berdaya. Oleh karena itu dikembangkan model pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada teori kekuasaan (*power*).

*Empowerment* atau pemberdayaan masyarakat, secara luas dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat guna menganalisa kondisi dan potensi serta masalah-masalah yang perlu diatasi. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintah desa dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat ini mencakup semua bidang. Pemberdayaan UKM Berbasis One Village One Product merupakan upaya bersama dari kedua belah pihak UKM, pemerintah, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan kemandirian UKM dengan mendasarkan pada keunikan potensi daerahnya (Indana & Sukidjo, 2020).

Menurut Wilson (1996) terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan masyarakat. *Tahap pertama* yaitu keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Pada *tahap kedua*, masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan-halangan atau faktor-faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam dirinya dan komunitasnya. Pada *tahap ketiga*, masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya dan komunitasnya. *Tahap keempat* yaitu upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas, hal ini juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Pada *tahap kelima* ini hasil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai kelihatan, dimana peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik. Pada *tahap keenam* telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, dimana keberhasilan dalam peningkatan kinerja mampu meningkatkan perasaan psikologis di atas posisi sebelumnya. Pada *tahap ketujuh* masyarakat yang telah berhasil dalam memberdayakan dirinya, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Siklus pemberdayaan ini menggambarkan proses mengenai upaya individu dan komunitas untuk mengikuti perjalanan kearah prestasi dan kepuasan individu dan pekerjaan yang lebih tinggi. Fahrudin (2012), pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat yang dilakukan dengan upaya: 1) *Enabling*, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. 2) *Empowering*, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. 3) *Protecting*, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan.

Konsep dasar untuk memahami proses pemberdayaan tidak terlepas dari: 1) *Power Dependency theory*, *Power* merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari interaksi sosial (Sadan, 1997). 2) *The Social System*, Talcott Parsons (1991) beranggapan bahwa setiap masyarakat tersusun dari sekumpulan sub sistem yang berbeda berdasarkan strukturnya maupun berdasarkan makna fungsionalnya bagi masyarakat yang lebih luas. Ketika masyarakat berubah, umumnya masyarakat tersebut akan tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik untuk menanggulangi permasalahan hidupnya. 3) *Feedback theory*, objek dari sistem adalah fungsi-fungsi dasar yang dibentuk oleh bagian-bagian system yaitu *Inputs, Processes, and Outputs* (Schoderbek, 1985). 4) Teori Pelembagaan, program *One Village One Product* juga menitikberatkan peran BUMDes sebagai salah satu lembaga yang berperan penting dalam keberhasilan proses pemberdayaan. 5) *Three Way Fit Theory* dari David Korten (1980), menunjukkan bahwa sangat penting adanya kesesuaian program dengan penerima manfaat, begitu juga dengan kesesuaian program dengan organisasi untuk dapat mencapai kesesuaian tersebut organisasi harus mempunyai kompetensi dalam menjalankan program.

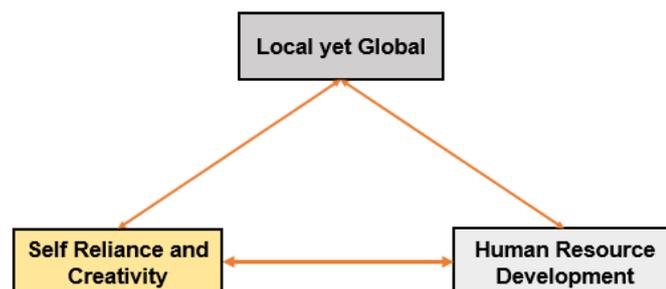
Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap meliputi: 1) Tahap kesadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan ketrampilan agar terbuka wawasan dan pemberian ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-ketrampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirian. OVOP memungkinkan dihasilkan potensi lokal yang berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lain (Smith, 2019).

### **Konsep One Village One Product**

One Village One Product (OVOP) adalah gerakan sukarela masyarakat lokal yang menggerakkan Pengembangan Ekonomi Lokal (LED) dan upaya revitalisasi, yang dimulai pada tahun 1979 di prefektur Oita, Jepang (Arin Widiyanti, 2018). *One Village One Product* adalah suatu pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal (Gardebroke, C.1 and Hernandez, n.d., 2019). Di negara-negara berkembang, ada kebutuhan mendesak untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan upah dengan merevitalisasi ekonomi regional (Sun et al., 2015). Untuk menetapkan produk unggulan daerah yang menjadi produk *One Village One Product* kriteria yang dipakai meliputi antara lain keunikan khas budaya dan keaslian lokal, mutu dan tampilan produk, potensi pasarnya yang terbuka di dalam dan di luar negeri, serta ontinyuitas dan konsistensi produksi yang didukung sumber daya local (Denpaiboon & Amatasawatdee, 2012). Konsep *One Village One Product* (OVOP) pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan program pengembangan kompetensi inti industri daerah sebagai suatu pendekatan pengembangan potensi daerah (*regional development*) di satu wilayah dalam mendorong pengembangan suatu produk kelas global yang unik, khas daerah memanfaatkan sumber daya dan budaya lokal (Ndione &

Suzuki, 2019). Strategi Departemen Perindustrian dalam pengembangan IKM dan UMKM, dengan pendekatan OVOP ini dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah sektor swasta dan masyarakat lokal

Konsep *One Village One Product* diharapkan dapat menghindari terjadinya persaingan tidak sehat diantara desa-desa bertetangga karena setiap desa dapat mengembangkan produk unggulan yang saling berbeda, sehingga kejenuhan pasar akibat membanjirnya produk yang sama dapat dicegah. OVOP bertujuan untuk mengembangkan produk yang mampu bersaing di pasar global dengan mengacu pada prinsip dasar OVOP, antara lain: 1) *Local but Global*. Produk atau jasa yang bernilai lokal dan dapat diterima secara global dalam prinsip OVOP, dilaksanakan dengan cara meningkatkan kualitas produk melalui proses pelatihan teknis peningkatan mutu produksi dan desain. 2) *Self-reliance and creativity*, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat dengan didukung pemerintah. 3) *Human resource development*. *One Village One Product* (OVOP) sebagai program pemerintah diarahkan dalam rangka pengembangan potensi masyarakat daerah secara menyeluruh. Program *One Village One Product* (OVOP) sangat menarik karena memiliki pengaruh besar di seluruh organisasi tanpa membentuk departemen khusus, dan dengan anggaran kecil (Son, 2010). *One Village One Product* (OVOP), konsep ini populer dalam pengembangan UMKM dengan kekuatan dan sumber daya lokal yang dimiliki (Lubis, 2018). Tujuan pelaksanaan Program *One Village One Product* (OVOP) dalam *Blue Print OVOP* (2010) adalah Suatu upaya membangun *suustainability* (kesinambungan) aktivitas melalui perluasan akses pasar yang dihasilkan masing-masing desa/daerah. *One Village One Product* (OVOP) merupakan program pengembangan berbasis masyarakat, dengan pendekatan berbasis pasar untuk pembangunan ekonomi (Nurunnisha & Saudi, 2019). Tiga prinsip *One Village One Product* (OVOP) meliputi: 1) sumber daya lokal tapi bernilai global, 2) kemandirian dan kreatifitas dan 3) pengembangan sumber daya (Anh, 2013), (Schumann, 2016) seperti dijelaskan pada gambar 1.



Gambar 1: Tiga prinsip *One Village One Product* (OVOP)

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah kualitatif. Penelitian dilakukan di Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan. Metode yang digunakan berupa metode *interractive* model. Teknik pengumpulan data

melalui wawancara dan dokumentasi. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah di analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang di anggap kredibel. Fokus penelitian pada peran pelebagaan dalam program *One Village One Product (OVOP)*.

Pada penelitian kualitatif, informan penelitian tidak di pilih secara acak, namun ditentukan dengan menetapkan secara langsung yang sesuai dengan prinsip yang telah berlaku, yakni dengan kesesuaian informan dan keterlibatan akan kategori yang terkait dengan penelitian: 1) Bapak Komari, SH, MM, Camat Rejoso Kabupaten Pasuruan, menjabat mulai 2018 hingga sekarang, 2) Bapak Kodar posisi Kepala Desa Sadengrejo, menjabat mulai tahun 2108 hingga sekarang. 3) M. Nazir, posisi Ketua BPD Desa Sadengrejo, menjabat mulai tahun 2019 hingga sekarang. 4) Ainul Yaqin, posisi Sekretaris Desa, menjabat sejak tahun 2018 hingga sekarang. 5) H. Sobih, posisi Kasun Dara menjabat sejak tahun 2007 hingga sekarang. 6) Nurul Aini, posisi Ketua UKM Topi Rajut, menjabat sejak tahun 2007 hingga sekarang, 7) Minhatul Aliyah, posisi Ketua UKM Keripik Bentol, menjabat sejak tahun 2005 hingga sekarang, 8) Ibu Maimunah, posisi Ketua UKM Makanan Olahan, menjabat sejak tahun 2016. 9) M. Kholili, posisi Ketua RW di Dusun Dara menjabat sejak tahun 2015, 10) M. Arif, posisi Ketua Karang Taruna, menjabat sejak tahun 2017, 12) Bpk. M. Suud, salah satu petani yang ada di Dusun Bantengan.

## HASIL ANALISIS DATA

Analisis data penelitian ini mengacu pada konsep Milles & Huberman (2015) yakni *interactive model* yang mengklasifikasikan analisis data kedalam tiga langkah, yakni: 1) Reduksi data (*Data Reduction*), 2) Penyajian data (*Display Data*), dan 3) Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi*): Reduksi data merupakan suatu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data-data tersebut diperoleh dari proses wawancara, observasi, juga dokumen yang mendukung dalam proses pemecahan masalah yang telah di rumuskan.

Penyajian data (*Display Data*). Data yang telah tersusun akan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk yang biasa digunakan pada data kualitatif terdahulu yakni dalam bentuk naratif.

Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi*). Penarikan kesimpulan mengungkap beberapa hal makna dari data yang telah dikumpulkan berupa kesimpulan yang tentatif, kabur, kaku, dan meragukan, sehingga perlu adanya verifikasi dalam kesimpulan tersebut. Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali reduksi data ataupun *display data* sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang.

## **Pelembagaan**

Merujuk pada pertanyaan yang berkaitan dengan “pendelegasian tugas” hasil penelitian mengidentifikasi bahwa pembagian tugas telah dilaksanakan oleh Kepala Desa, sehingga masing-masing perangkat desa mengetahui tugas dan kewajiban yang harus dilakukan, hal tersebut berpengaruh pada efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Merujuk pada pertanyaan yang berkaitan dengan “Penyusunan Prioritas Masalah” Pemerintah desa telah menyusun skala prioritas masalah, berdasarkan potensi yang ada di masyarakat dengan melakukan pemeringkatan masalah, akan tetapi pemeringkatan masalah belum disertai dengan formulasi yang jelas dan sistematis, sehingga program kegiatan yang dihasilkan belum dapat menyelesaikan permasalahan yang mendasar yang dihadapi masyarakat, dan selaras dengan arah kebijakan pemerintah desa. Hasil wawancara dengan beberapa Informan menunjukkan bahwa Pemerintah desa telah menyusun skala prioritas masalah, berdasarkan potensi yang ada di masyarakat dengan melakukan pemeringkatan masalah. Namun dalam hal pemeringkatan masalah belum disertai dengan formulasi yang jelas dan sistematis, sehingga program atau kegiatan yang dihasilkan belum dapat menyelesaikan permasalahan yang mendasar yang dihadapi masyarakat. Begitu juga dengan gagasan dan saran yang disampaikan, masing-masing kelompok masyarakat menyampaikan tentang permasalahannya sendiri-sendiri yang cenderung parsial dan sektoral.

## **Empowerment (Keterlibatan Masyarakat)**

Merujuk pada keterangan yang disampaikan oleh Informan berkaitan dengan pertanyaan tentang “empowerment (keterlibatan masyarakat)”, dalam proses penyusunan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Desa Sadengrejo, secara umum tingkat partisipasi warga sangat tinggi, yang diwujudkan dalam bentuk antusiasme dan semangat menghadiri dan mengikuti kegiatan rapat atau pertemuan warga yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, baik dalam rangka membahas tentang penyusunan program dan kegiatan, musrenbang desa, maupun musyawarah desa lainnya.

Merujuk pada pertanyaan yang berkaitan dengan “Peran Masyarakat dalam Program Pemberdayaan” hasil analisis menunjukkan bahwa Peran UKM menjadi pertimbangan dalam penetapan prog/ kegiatan desa, hal ini sangat tepat mengingat pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kelompok-kelompok usaha yang berkembang di masyarakat

Dari hasil wawancara dengan beberapa Informan, Pemerintah Desa dalam menetapkan kegiatannya mempertimbangkan peran UKM menjadi, hal ini sangat tepat mengingat pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kelompok-kelompok usaha yang berkembang di masyarakat. Peran masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Sadengrejo meliputi beberapa hal sebagai berikut: 1) Sebagai pelaku yaitu masyarakat sendiri yang akan memainkan peran utama dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat, serta peran pemerintah Desa lebih merupakan pelengkap dan penunjang termasuk menentukan aturan dasar kegiatannya. Bagi pemerintah Desa, dalam kegiatan

pemberdayaan masyarakat dianggap sebagai suatu proses belajar usaha melalui proses evaluasi terhadap segala hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan usaha, serta mempelajari berbagai kendala yang dihadapi. Peran masyarakat sebagai pelaku dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Sadengrejo dapat di kategorikan baik. 2) Sebagai partisipan yaitu partisipasi sosial mengandung makna agar masyarakat lebih berperan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengusahakan penyusunan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme dari bawah ke atas dengan pendekatan memperlakukan manusia sebagai subyek pemberdayaan, pemberdayaan masyarakat merupakan kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan-pilihan, baik yang menyangkut penentuan nasib sendiri maupun perubahan diri sendiri atas dasar kekuatan sendiri sebagai faktor penentu. Peran masyarakat sebagai partisipan dapat dikategorikan baik. 3) Sebagai peserta, yaitu keterlibatan masyarakat dan aktif dalam kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat. Harapannya bagi masyarakat dan Desa kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Peran masyarakat sebagai peserta dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Sadengrejo dapat di kategorikan baik.

### **Program *One Village One Product* (OVOP)**

Merujuk tentang pertanyaan tentang "Program *One Village One Product* (OVOP)" hasil analisis dapat dikatakan Penyusunan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sadengrejo sudah mengarah pada tahapan pelaksanaan program Program *One Village One Product* (OVOP), yang meliputi: pemetaan potensi dan permasalahan, disparitas wilayah, pengembangan secara kelompok, sosialisasi program, integrasi produksi, dan pengembangan pemberdayaan. Namun tahapan tersebut masih belum menyeluruh, terutama dalam hal menyusun perencanaan usaha.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sadengrejo sudah mengarah pada tahapan pelaksanaan Program *One Village One Product* (OVOP). Pemerintah Desa Sadengrejo telah menerapkan tahapan pelaksanaan Program *One Village One Product* (OVOP) antara lain: 1) Memetakan petakan potensi dan permasalahan yang ada, 2) Menemukan sasaran, sebaiknya basis desa tertinggal atau memiliki kantong kemiskinan, 3) Mengupayakan Program *One Village One Product* (OVOP) di lokasi tersebut dikembangkan secara kelompok, 4) Memilih potensi yang akan dijadikan usaha Program *One Village One Product* (OVOP) dan komunikasikan dengan warga masyarakat. 5) Mendorong dan mengembangkan potensi yang dipilih baik produksi maupun produktivitas secara terintegrasi, 6) Memperkuat kelembagaan yang ada dengan konsep pemberdayaan, 7) Membuat perencanaan usaha (*business plan*) secara terpadu. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tahapan ini kurang berjalan dengan baik karena tidak ada feedback dalam pelaksanaan program OVOP.

## PEMBAHASAN

Semua aktifitas di Desa Sedangrejo selalu diawali dengan Musyawarah Desa, begitu juga dengan adanya program baru yang akan dijalankan. Musyawarah Desa merupakan media pertukaran ide, informasi, dan aspirasi masyarakat Desa. Musyawarah desa disiapkan sebagai wadah implementasi ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Musyawarah Desa dilaksanakan dengan beberapa tahapan antara lain: 1) tahap Persiapan. Persiapan Musyawarah Desa adalah serangkaian kegiatan yang terdiri dari: a) Rapat Koordinasi BPD persiapan pelaksanaan Musyawarah Desa. Rapat BPD dalam rangka membahas pemetaan aspirasi kebutuhan masyarakat, sarana-prasarana pendukung dan indentifikasi peserta undangan dan pendamping. b) Surat Pemberitahuan BPD kepada Pemerintah Desa. Penyampaian surat kepada Pemerintah Desa yang berisi permintaan agar Pemerintah menyiapkan. c) Pemetaan Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat, d) Rapat Perumusan Pandangan Resmi BPD, e) Pembentukan Panitia Pelaksana Musyawarah Desa. f) Penyiapan Media Pembahasan, g) Jadwal Kegiatan, Tempat dan Sarana Pendukung, Penyiapan Bahan dan Pendanaan, h). Musyawarah Pemangku Kepentingan. Musyawarah pemangku kepentingan adalah kegiatan pra Musyawarah Desa yang dilakukan oleh unsur peserta Musyawarah Desa untuk menggali aspirasi dan pandangan mengenai hal strategis dari kelompok yang diwakilinya, yang dihadiri: kepala desa dan perangkat desa, warga dusun kelompok masyarakat. Hasil musyawarah pemangku kepentingan menjadi aspirasi dan kebutuhan kelompok yang harus disampaikan didalam pelaksanaan Musyawarah Desa.

### Model Pelembagaan

Suatu program dikatakan melembaga manakala program tersebut telah menyatu dalam kehidupan masyarakatnya. Ada banyak hal yang mengantarkan suatu program pada titik keberhasilannya. Seperti yang telah dijabarkan pada penjelasan sebelumnya bahwa mengenai model pemberdayaan ekonomi yang diterapkan pada Program *One Village One Product* (OVOP) merupakan suatu rangkaian sistem yang telah dirumuskan sedemikian rupa sehingga tercipta suatu model program pemberdayaan atas turunan dari model secara nasional. Namun, apakah model umum tersebut dapat langsung diterapkan secara merata disuluruh wilayah? Jawabannya adalah tidak sepenuhnya. Hal tersebut dikarenakan kondisi yang ada antara daerah yang satu dengan daerah lainnya mempunyai perbedaan. Maka dari itu Program *One Village One Product* (OVOP) merupakan suatu program yang sifatnya percampuran antara pendekatan *top down* dan *bottom up*.

Mengacu pada pertanyaan tentang "Pelembagaan Program *One Village One Product* (OVOP)" hasil analisis adalah Penggalan ide/gagasan, saran, kritik dan masukan merupakan upaya pemerintah desa dalam rangka memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan berikutnya. Hal tersebut sesuai dengan model sistem balikan dimana terdapat *feedback* yang sangat berguna dalam membenahan program selanjutnya, karena masyarakat yang tahu persis

keadaan dan kondisi serta kebutuhan di lapangan. Adanya *feedback* tersebut sebagai bahan pengembangan program *One Village One Product* (OVOP). Kesimpulan yang dapat diambil dari model pelebagaan program *One Village One Product* (OVOP) di Desa Sadengrejo tersebut merupakan percampuran antara pendekatan *top down* dan *bottom up*, akan tetapi *feedback* yang berguna dalam membenahan program selanjutnya belum sepenuhnya berjalan efektif.

Komponen dari model pelebagaan program *One Village One Product* (OVOP) yang dirumuskan adalah berupa input, proses, output dan *feedback*

### **Input**

Input atau masukan yang diberikan pada program *One Village One Product* (OVOP) Desa Sadengrejo ini berupa ide/gagasan yang menjadi awal dari seluruh rangkaian sistem. Untuk keberhasilan sebuah program, input yang diberikan haruslah sesuai dengan karakteristik program dan lingkungan masyarakatnya. Ide/gagasan tersebut yang selanjutnya berkembang menjadi program. Input selanjutnya adalah program sebagai wujud dari ide/gagasan yang dituangkan untuk menyelesaikan permasalahan. Program sebagai input dikarenakan sifat program *One Village One Product* (OVOP) yang memang bersifat campuran antara *bottom up* dan *top down*. Sebagai program secara nasional, instruksi pengembangan berasal dari pusat, namun dalam pelaksanaannya mulai dari pemilihan produk unggulan daerah hingga pelaksanaannya bersifat *bottom up* berdasarkan usulan daerah. Salah satu faktor keberhasilan program *One Village One Product* (OVOP) dikarenakan program yang diberikan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakatnya. Setelah program, sub sistem input lainnya adalah Sumberdaya yang tepat dan memadai juga menjadi kunci keberhasilan sebuah program. Hal tersebut dikarenakan sumberdaya merupakan input yang dibutuhkan untuk diproses menjadi sebuah output oleh organisasi. Sumber daya yang paling menonjol dalam program *One Village One Product* (OVOP) Desa Sadengrejo ini adalah sumberdaya manusia. SDM yang ada Desa Sadengrejo memang diakui oleh berbagai pihak mempunyai kemampuan inovasi yang tinggi dalam ketelatenan. Selain itu, sifat pro aktif mereka untuk menindaklanjuti program serta mengupayakan keberlangsungannya menjadi salah satu kunci keberhasilan sebuah program. Hal tersebut karena sikap dari penerima manfaat sangat berkaitan dengan keberhasilan sebuah program. SDM yang mau dan mampu akan dapat mengoperasikan sumber daya lainnya. Pada dasarnya, seluruh sumber daya yang diperlukan baik itu SDM, sumber daya finansial, *role material*, sampai informasi sangat berkaitan satu dengan yang lainnya. Maka dari itu kebutuhan sumber daya harus dimiliki oleh semua program. Namun yang harus diperhatikan disini adalah perlu tindakan nyata untuk memastikan ketersediaan bahan baku, demi keberlangsungan produksi

### **Proses**

Sebagai sebuah sistem, model semua input yang ada dalam program *One Village One Product* (OVOP) di Desa Sadengrejo ini

dijalankan melalui sebuah proses. Sumber daya yang ada akan dikelola oleh sebuah organisasi. Organisasi sebagai pelaksana sebuah program harus mempunyai kompetensi yang sesuai serta mempunyai struktur intrin yang memadai. Kemampuan dan komitmen organisasi sangatlah diperlukan. Dengan adanya kompetensi yang memadai, organisasi juga dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Karena sebuah program tidak berhenti pada saat pelaksanaannya. Butuh berbagai keputusan dalam rangka pembenahan dan perbaikan ditengah perjalanan sebuah program. Organisasi yang terlibat dalam program *One Village One Product* (OVOP) ini sangat kompleks mulai dari SKPD terkait hingga Pemerintah Desa sebagai pelaksana teknis di lapangan. Didalam organisasi, unsur yang mempunyai andil besar adalah kepemimpinan. Kepemimpinan sangat berpengaruh dalam jalannya organisasi yang juga berpengaruh pada pelaksanaan sebuah program. Untuk dapat menghasilkan program yang efektif dan efisien, maka pemimpin harus dapat menerapkan model kepemimpinan yang tepat. sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. program *One Village One Product* (OVOP) sebagai sebuah program yang dikembangkan di wilayah pedesaan, tentu pemimpin yang berorientasi pada hubungan sangat diperlukan. Pada masa dimana masyarakat yang semakin dewasa seperti saat ini, bukan masanya lagi menerapkan gaya kepemimpinan yang otoriter, sebaliknya, pemimpin yang demokratis akan lebih memberikan ruang aspirasi masyarakat sehingga masyarakat merasa lebih dilibatkan dalam proses sebuah kebijakan. Sangat tepat jika diterapkan dalam program *bottom up* seperti program *One Village One Product* (OVOP). Tidak dapat dipungkiri bahwa posisi pemimpin masih mempunyai kekuatan yang besar dalam perjalanan sebuah program menuju keberhasilannya. Karena pemimpin adalah motor penggerak yang mengarahkan SDM untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya lainnya. Posisi yang dimiliki oleh pemimpin dapat memberikan doktrin yang dapat mengarahkan program pada keberhasilannya. Doktrin yang diberikan oleh seorang pemimpin merupakan salah satu proses yang dapat menggerakkan sumber daya yang ada dalam rangka keberhasilan program. Posisi strategis seorang pemimpin dapat digunakan untuk dapat memberikan doktrin positif melalui regulasi secara formal maupun melalui contoh nyata tindakannya. Dari proses pelaksanaan program *One Village One Product* (OVOP) dapat melihat posisi dan kapasitas seorang pemimpin mengarahkan program pada keberhasilannya melalui doktrin yang diberikan. Sebagai sebuah program pemberdayaan ekonomi dengan peningkatan nilai produk unggulan lokal, hal yang juga diperlukan dalam proses menuju keberhasilan program adalah strategi pemasaran produk. Strategi pemasaran merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan pengembangan produk untuk perluasan pasar. Tanpa adanya strategi pemasaran yang terus berkembang sesuai dengan kondisi pasar, maka akan sangat sulit suatu program mempertahankan eksistensinya, terlebih di pasar global seperti saat ini. Salah satu penunjang pemasaran produk adalah dengan menjalin kerjasama. Upaya kerjasama dengan pihak terkait sangat diperlukan untuk membuka berbagai peluang pengembangan produk serta perluasan

jaringan pemasaran. Semakin luas kerjasama yang dibangun, akan memberikan perluasan jaringan termasuk memperbanyak informasi. Hal tersebut juga diperlukan dalam pengembangan sebuah program dalam upaya adaptasi dengan perubahan dan perkembangan lingkungan global untuk mempertahankan eksistensinya. Kondisi lingkungan program juga menjadi penting dalam pelaksanaan sebuah program. Lingkungan program termasuk didalamnya lingkungan sosial budaya dan ekonomi masyarakatnya. Hal-hal demikian sangat penting untuk diperhatikan dalam upaya keberhasilan sebuah program. Kesiapan lingkungan kebijakan akan berdampak pada tingkat komitmen dan partisipasi dari seluruh elemen program. Sehingga program tersebut mengakar pada kehidupan masyarakatnya. Sebuah program memang harus ada partisipasi dari pemerintah pusat hingga tataran masyarakat yang paling kecil yaitu masyarakat. Dengan adanya kesinambungan dan harmonisasi dari seluruh elemen disetiap lapisan tersebut, akan tercipta program yang berkesinambungan juga hingga dapat menghasilkan manfaat yang diharapkan, yaitu kemandirian ekonomi.

### **Output**

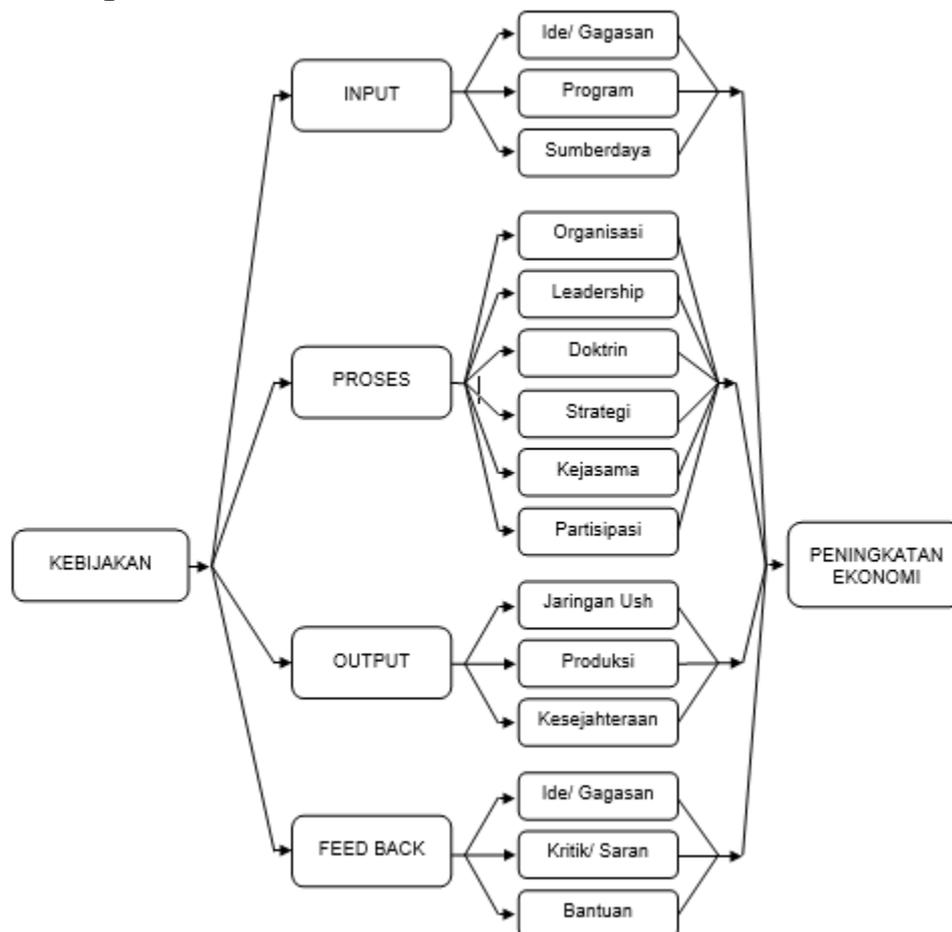
Hasil dari sebuah program adalah output serta manfaat yang dihasilkan. Beberapa output yang didapatkan dari pengembangan produk *One Village One Product* (OVOP) adalah peningkatan produksi, peningkatan jaringan usaha, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan Jaringan usaha yang dibangun semakin meluas melalui berbagai jaringan kerjasama yang dilakukan serta seringnya pelibatan pengrajin dalam berbagai pameran baik nasional maupun internasional. Hal tersebut berakibat pada peningkatan produksi dan branding dalam pasar lokal, nasional, maupun internasional yang semakin mengenal produk Desa Sadengrejo tersebut, harga serta kualitas yang kompetitif.

Dengan demikian, permintaan pasar terhadap produk Desa Sadengrejo dapat dicapai yang akan berakibat pada peningkatan pendapatan. Sehingga, tujuan dari program pengembangan produk unggulan daerah melalui program *One Village One Product* (OVOP) dapat tercapai yaitu peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.

### **Feedback**

Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa model yang dibangun oleh peneliti adalah model sistem balikan. Dimana *feedback* sangat dipertimbangkan untuk pembenahan program selanjutnya yang akan diarahkan pada input kembali. Feedback yang diberikan oleh masyarakat Desa Sadengrejo serta pihak-pihak terkait setelah berjalannya program adalah berupa ide/ gagasan, kritik, saran, serta bantuan. Disisi lain juga terus dijalin kerjasama dengan akademisi hingga pihak-pihak swasta untuk pembenahan administrasi hingga manajemen BUMDes sebagai lembaga pelaksana ditingkat Desa. Adanya *feedback* yang diberikan oleh pihak terkait

tersebut termasuk masyarakat adalah salah satu hal yang mengantarkan program *One Village One Product* (OVOP) menuju perkembangan dan keberhasilannya. Mengingat *feedback* tersebut dapat dijadikan masukan program kedepan, karena masyarakat yang tahu persis keadaan dan kondisi serta kebutuhan dilapangan. Program OVOP yang telah dilaksanakan, memerlukan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan selanjutnya (Indana & Sukidjo, 2020). Gambar 1 menjelaskan tentang model kelembagaan OVOP.



Gambar 1: Model Pelembagaan Program *One Village One Product* (OVOP) yang disarankan.

### **Empowerment (Pemberdayaan) Masyarakat.**

Empowerment atau Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintah desa dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat ini mencakup semua bidang.

Merujuk pada “Keterlibatan masyarakat” hasil analisis yaitu: bahwa kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan rapat desa. Merujuk pada keterangan yang disampaikan oleh Informan diatas, dalam proses penyusunan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Desa Sadengrejo, secara umum tingkat partisipasi warga sangat tinggi, yang diwujudkan dalam bentuk antusiasme dan semangat menghadiri dan

mengikuti kegiatan rapat atau pertemuan warga yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, baik dalam rangka membahas tentang penyusunan program dan kegiatan, musrenbang desa, maupun musyawarah desa lainnya.

Menurut sumaryadi (2010) beberapa kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat berasal dari: a). Kepribadian individu; kestabilan (*homeostatis*), kebiasaan (*habit*), seleksi ingatan dan persepsi (*selective perception and retention*), ketergantungan (*dependence*), super-ego yang terlalu kuat cenderung membuat seseorang tidak mau menerima pembaharuan, dan rasa tak percaya diri (*self-distrust*), b). Sistem sosial; kesepakatan terhadap norma tertentu (*conformity tonorms*), yang mengikat sebagian anggota masyarakat pada suatu komunitas tertentu, kesatuan dan kepaduan sistem dan budaya (*systemic and cultural coherence*), kelompok kepentingan (*vesied interest*), hal yang bersifat sakral (*sacrosanct*), dan penolakan terhadap orang luar (*rejection of outsiders*).

### **Program *One Village One Product* (OVOP) di Desa Sadengrejo**

Dalam rangka mewujudkan industrialisasi desa, pemerintah melaksanakan program peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan usaha produktif. Salah satu kegiatan tersebut dilakukan dengan meningkatkan nilai produk-produk unggulan daerah yang memiliki peluang pasar di pasar domestik maupun ekspor. Program *One Village One Product* (OVOP) merupakan suatu program integratif yang berupaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi dan kekayaan daerah, meningkatkan pendapatan para pelaku usaha dan masyarakat, dan sekaligus meningkatkan rasa percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki masyarakat dan daerahnya. Sumber daya alam ataupun produk budaya lokal serta produk khas lokal yang telah dilakukan secara turun temurun dapat digali dan dikembangkan untuk menghasilkan produk bernilai tambah tinggi yang memiliki potensi pasar maupun ekspor.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Program *One Village One Product* (OVOP) merupakan program dengan menggunakan pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Melalui pemberdayaan masyarakat setempat, penggalian dan pengembangan potensi lokal ini dapat memunculkan ekonomi kreatif yang dapat menjadi sumber ekonomi masyarakat. *One Village One Product* (OVOP) sebagai salah satu program pemberdayaan, sangat sejalan dengan pola pemberdayaan yang dikembangkan di Desa Sadengrejo, dengan potensi wilayah dan partisipasi masyarakatnya, Desa Sadengrejo telah melaksanakan tahapan-tahapan konsep program *One Village One Product* (OVOP). Model pelebagaan

yang digunakan dalam pelaksanaan OVOP adalah kombinasi antara bottom up dan top down, meskipun feedback belum berjalan secara efektif.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian telah diketahui bahwasan program *One Village One Product* (OVOP) memang belum cukup dikenal oleh masyarakat Desa Sadengrejo. Namun, untuk lebih memperbaiki perjalanan program yang telah ada dan dapat menjadi masukan bagi keberhasilan *One Village One Product* (OVOP) secara berkelanjutan, maka: 1) Model yang dibangun oleh peneliti diharapkan dapat sebagai rekomendasi program *One Village One Product* (OVOP) di Desa Sadengrejo. 2) Sosialisasi program harus terus dijalankan oleh pemerintah desa dikarenakan program *One Village One Product* (OVOP) masih belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. 3) Penguatan kelembagaan sangat diperlukan untuk dapat menjalankan program *One Village One Product* (OVOP). Organisasi harus dapat melembaga dalam kehidupan masyarakatnya. Artinya, seluruh komponen organisasi tersebut mengerti terhadap kondisi yang ada dalam BUMDes, jadi pemahaman tidak bisa hanya sebatas pada pemimpin namun seluruh komponen yang ada di dalamnya. 4) adanya feedback dalam pelaksanaan program.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anh, N. T. (2013). One Village One Product (OVOP) in Japan to One Tambon One Product (OTOP) in Thailand: Lessons for Grass Root Development in Developing Countries. *Journal of Social and Development Sciences*, 4(12), 529–537. <https://doi.org/10.22610/jsds.v4i12.794>
- Arin Widiyanti. (2018). Human capital as an engine of economic development. *Jurnal Litbang Sukowati*, 1(2), 80–94.
- Azizah, N., & Kriswibowo, A. (2020). One Village One Brand for Sustainable Rural Economic Development: A Three Stream Perspective. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 8(1), 96–105. <https://doi.org/10.14710/jwl.8.1.96-105>
- Denpaiboon, C., & Amatasawatdee, K. (2012). Similarity and Difference of One Village One Product (OVOP) for Rural Development Strategy in Japan and Thailand. *Japanese Studies Journal Special Issue*, 29(2), 52–62.
- Gardebroek, C.1 and Hernandez, M. . (n.d.). *This document is discoverable and free to researchers across the globe due to the work of AgEcon Search . Help ensure our sustainability . Modelling Outcomes and Assessing Market.*
- Hadi, S., Wasahua, O., & Masri, Z. A. (2017). Metode Analisis SWOT dalam Pelaksanaan One Village One Product Agribisnis Holtikultura (Studi Kasus di Koperasi Mitra Tani Parahyangan Cianjur). *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(2), 159. <https://doi.org/10.30998/jabe.v4i2.2143>
- Indana, Z., & Sukidjo, S. (2020). Evaluation the Implementation of One Village One Product Program as Empowerment Efforts on SME'S to

- Develop Superior Regional Products. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(9), 255. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i9.1966>
- Lubis, M. Z. M. (2018). Prospek Destinasi Wisata Halal Berbasis Ovop (One Village One Product). *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 3(1), 30–47.
- J. Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: osda
- Ndione, J. S., & Suzuki, K. (2019). Beyond the One Village One Product (OVOP) Concept through Design Thinking Approach. *International Journal of Education and Research*, 7(4), 143–156.
- Ngugi, J. N., & Bwisa, H. (2013). Factors Influencing Growth of Group Owned Small and Medium Enterprises: A Case of One Village One Product Enterprises. *International Journal of Education and Research*, 1(8), 1–14. <http://www.ijern.com/journal/August-2013/44.pdf>
- Nurunnisha, G. A., & Saudi, M. H. M. (2019). Proposed brand leverage with one village one product (OVOP) approach case study: Kalua in Ciwidey. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(3), 815–825.
- Purnama, I. K. E., Ariastita, P. G. A., Handayeni, K. D. M. E., & Nugroho, S. M. S. (2019). Penerapan E-Commerce Untuk Penguatan UMKM Berbasis Konsep One Village One Product di Kabupaten Karangasem. *Sewagati*, 2(2), 85–90. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v2i2.4612>
- Schumann, F. R. (2016). A Study of One Village One Product (OVOP) and Workforce Development: Lessons for Engaging Rural Communities around the World. *Journal of International OVOP Policy*, 671, 1–23.
- Smith, N. R. (2019). One village, one product: Agro-industrial village corporatism in contemporary China. *Journal of Agrarian Change*, 19(2), 249–269. <https://doi.org/10.1111/joac.12301>
- Son, K. (2010). The start of a new program in a local government: The case of one village one product movement in Oita. *Journal of Policy Science*, 5. <https://core.ac.uk/download/pdf/60547961.pdf>
- Sun, X., Zhan, L., Yang, Z., Liu, B., Li, C., & Zhu, L. (2015). Evaluation on the “one village one product” economic development benefit of chengdu Shuangliu County based on entropy weight TOPSIS method. *Advance Journal of Food Science and Technology*, 9(10), 749–754. <https://doi.org/10.19026/ajfst.9.1653>
- Susanti, R., Alfiah, F., Lestari, M. D., Rahmaini, A., & Tauhid, R. (2022). *Community Empowerment Through One Village One Product Based On Local Potential Of Bukit Payung Village Pemberdayaan Masyarakat Melalui One Village One Product Berbasis Potensi Lokal Desa Bukit Payung*. 2(3).
- Xujin, P., & Li, J. (2013). The analysis of peasant households’ collective brand maintenance behavior in the “one village, one product” program of China. *Procedia Computer Science*, 17, 770–780. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2013.05.099>